

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Hadi Irawan
NPM : 187310163**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PEKANBARU
2022**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hadi Irawan
NPM : 187310163
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normative dan kreatif metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta di setuju untuk di uji dalam sidang konfrehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 28 Juni 2022
Pembimbing I,

Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hadi Irawan
NPM : 187310163
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

Mengetahui
Pembantu Dekan 1,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Sekretaris

Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota

Drs. H. Zaini Au, M.Si

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hadi Irawan
NPM : 187310163
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris

Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Ilmu Pemerintahan di FISIPOL Universitas Islam Riau atas dukungan dari awal penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf/pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru umumnya, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua tersayang dan semua sahabat yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah Swt semoga jasa baik beliau mendapatkan balasan dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis

Hadi Irawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Pemerintahan	11
2. Konsep Manajemen	12
3. Konsep Pengelolaan.....	14
4. Konsep Pemerintah Desa	18
5. Konsep Pembangunan Infrastruktur	21
6. Konsep Pembangunan Desa	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Konsep Operasional.....	28
E. Operasional Penelitian	29

BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan dan Key Informan.....	32
D. Teknik Penarikan Informan.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	39
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Kabupaten Bengkalis	40
B. Kecamatan Bengkalis.....	45
C. Desa Wonosari.....	48
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Identifikasi Key Informan dan Informan	54
B. Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	55
1. Planning (Perencanaan).....	55
2. Organizing (Mengorganisasikan)	61
3. Motivating (Memotivasi)	63
4. Controlling (mengendalikan).....	65
5. Evaluating (Mengevaluasi).....	67
C. Pembahasan	70
BAB VI : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Prospek Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan IDM Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.....	4
Tabel 2	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Tahun 2021	6
Tabel 3	Informan Penelitian	32
Tabel 4	Jadwal Kegiatan Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	37
Tabel 5	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	43
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	44
Tabel 7	Jumlah Penduduk dan Presentase Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2020	46
Tabel 8	Jumlah Penduduk dan Presentase Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2020	47
Tabel 9	Penduduk Desa Wonosari	51
Tabel 10	Sarana dan Prasarana Desa Wonosori	51
Tabel 11	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Tahun 2020	57
Tabel 12	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Planning (Perencanaan)	60
Tabel 13	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	

	Kabupaten Bengkalis pada indikator Organizing (Mengorganisasikan)	62
Tabel 14	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Motivating (Memotivasi)	64
Tabel 15	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Controlling (mengendalikan)	67
Tabel 16	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Evaluating (Mengevaluasi)	70
Tabel 17	Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Kerangka Berpikir Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	27
Gambar 2	Struktur Organisasi Desa Wonosari.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Wawancara Penelitian	82
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	88
Lampiran 3	Surat-Surat Pendukung	93



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Irawan
NPM : 187310163
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2022
Pelaku Pernyataan,

Hadi Irawan

PENGLOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Hadi Irawan
Npm. 187310163

Abstrak

Kata Kunci: Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Planning (Perencanaan), Organizing (Mengorganisasikan), Motivating (Memotivasi), Controlling (mengendalikan), dan Evaluating (Mengevaluasi). Tipe penelitian kualitatif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Wonosari, Sekretaris Desa Wonosari, dan Ketua BPD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat ditarik kesimpulan Perencanaan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari di selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis serta dalam penyusunan rencana pembangunan selalu melibatkan unsur masyarakat. Proses pengorganisasian pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari diawali dengan penyusunan anggaran pendapat belanja desa. Bentuk pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dalam bentuk pemberian pujian dan semangat. Bentuk pengawasan terkait dari pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam bentuk turun kelapangan. Bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban.

MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN WONOSARI VILLAGE, BENGKALIS DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

Hadi Irawan
npm. 187310163

Abstract

Keywords: Infrastructure Management and Development

This study aims to determine the management of infrastructure development in Wonosari Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessment indicators used include Planning (Planning), Organizing (Organizing), Motivating (Motivating), Controlling (controlling), and Evaluating (Evaluating). Type of qualitative research. The data comes from the results of interviews and observations. The informants in this study consisted of the Wonosari Village Head, Wonosari Village Secretary, and the Head of the BPD. Based on research conducted on the Management of Infrastructure Development in Wonosari Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency, it can be concluded that planning related to Infrastructure Development in Wonosari Village is in line with the RPJMD of Bengkalis Regency and in the preparation of development plans always involves elements of the community. The organizing process for Infrastructure Development in Wonosari Village begins with the preparation of a village expenditure budget. The form of providing motivation to employees in doing their work in managing infrastructure development in Wonosari Village is in the form of giving praise and encouragement. The form of supervision related to the management of infrastructure development in Wonosari Village is carried out in the form of fieldwork. The form of evaluation in the management of infrastructure development in Wonosari Village is carried out in several stages, namely the implementation of the supervision stage and the accountability stage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006: 3).

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu (Ginandjar, 1996: 392).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan tertentu. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini.

Menurut Kessa (2015: 19) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerinah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan utama yaitu:

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan,

irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah N0. 4 Tahun 2008 tentang tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan larangan Pemerintahan Desa. Pada pasal 5 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahapan Pembangunan Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

1. Perencanaan Pembangunan Desa;
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 - b. Penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - a. Perangkat daerah kabupaten/kota;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
3. Pengawasan Pembangunan Desa;
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa
4. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Salah satu desa yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah desa Wonosari Kecamatan bengkalis. Wonosari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini berada di pinggir Kota Bengkalis. desa Wonosari Kecamatan bengkalis merupakan desa yang berstatus mandiri dengan nilai IDM (Indeks Desa Membangun) sebesar 0.9165 dengan beberapa beberapa item yang perlu di bangun berdasarkan IDM Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berikut:

Tabel 1 Prospek Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan IDM Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis

No	Indikator IDM	Keterangan	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Air minum	Sumber air minum berasal dari kemas, mata air	Pemasangan PDAM/Air ledeng tanpa meteran	PU Desa CSR PDAM
2	Pasar	-	Pembangunan pasar permanen	Disperindakop UKM
3	Kedai dan Penginapan	1 unit	Pembangunan 1 unit penginapan	Dinas Pariwisata Desa Perorangan Swasta
4	Bank dan BPR	BPR = 1	Fasilitas pembangunan Bank Swasta.BPR	Perbankan

1	2	3	4	5
5	Moda Transportasi Umum	Trasportasi umum ada tanpa trayek tetap	Transportasi Umum dengan Trayek Tetap	Dishub
6	Tanggap Bencana	Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi/tanggap bencana	Pembangunan/ pengadaan 1 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/ potensi bencana)	BNPB Kemendes Desa CSR

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>

Desa ini sebahagian besar penduduknya adalah dari Suku Jawa yang datang ke Pulau Bengkalis pada masa Pemerintahan Belanda. Secara umum desa Wonosari termasuk desa yang cukup baik khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat serta pertanian namun dari sisi pembangunan masih tergolong belum maksimal. Hal ini sebagaimana hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022-2023 pada Jum'at (7/10/2021) di Gedung Serba Guna, Jalan Wonosari Tengah berikut:

“Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan bukan hanya pembangunan fisik saja tetapi juga harus meliputi masalah pemberdayaan masyarakat karena sektor ini juga harus diperhatikan dan diprioritaskan” (Wonosari.desa.id)

Berdasarkan Musrembangdes Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis 2020 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun Anggran 2021 dan usulan pembangunan ke kabupaten untuk tahun anggaran 2022

diketahui beberapa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur sebagaimana data pada tabel berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Target/Volume	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Semenisasi Hidayat	Gg. RT 01/RW 03	102 M x 2,5 M	85.989.399,66	Dana Desa
2	peningkatan Akasia	Gg. RT 12	90 M x 3 M	91.024.700,40	Dana Desa
3	Semenisasi Abdul Samad	Gg. RT 01/RW 05	110 M x 3 M	124.670.601,00	ADD
4	Semenisasi Pinang	Gg. RT 01/RW 10	100 M x 3 M	101.079.450,00	ADD
5	Semenisasi Muslimin	Gg. RT 01/RW 04	175 M x 3 M	176.925.950,25	ADD
6	Semenisasi Halimah	Gg. RT 03/RW 08	62 M x 3 M	62.742.349,56	ADD
7	Lanjutan Semeniasi Merdeka	Gg. RT 01/RW 02	65 M x 3 M	65.684.515,00	Dana Desa
8	Peningkatan Habibi	Gg. RT 02/RW 05	174 M x 3 M	146.450.550,00	Dana Desa
9	Pembangunan Parit Lingkungan	RT 01/RW 06	151 M	95.704.350,00	Dana Desa
10	Pembangunan Parit Beton Yakin	Gg. RT 02/RW 02	150 M	127.620.625,50	Dana Desa
11	Lanjutan Drainase Makmur	Gg. RW 04	115 M	94.227.249,85	P3ID
12	Lanjutan Drainase Rozali	Gg. R 01/RW 01	40 M	58.430.000,000	P3ID
13	Pembangunan Parit Beton Lingkungan	RT 03/RW11	94 M	60.953.599,70	ADD
14	Lanjutan Drainase Lingkungan Durian	Gg. RT 01/RW 02	174 M x 2,5 M	48.872.850,00	P3ID

1	2	3	4	5	6
15	Pembangunan Drainase Halim I Gg.	RT 03/RW 12	150 M	49.307.850,00	Dana Desa
16	Pembangunan Duiker Antarsari II Jl.	RT 01/ RW 10	P.5,5 x L. 1,7 x T.1,75 M	30.481.400,00	Dana Desa
17	Pembangunan Duiker Gg. Karet 4	RT 01/ RW 10	P.4,5 x L. 3,2 x T.2,25 M	35.078.450,00	Dana Desa
18	Pembangunan Duiker Sekapur Sirih Gg.	RT 03/RW 07	1 Unit	35.078.450,00	Dana Desa
19	Pembangunan Duiker Solihin Gg. H.	RT 01/ RW 11	1 Unit	35.078.450,00	Dana Desa
20	Pembangunan Gorong-Gorong Gg. Amal	RT 01/ RW 01	1 Unit	13.000.000,00	Dana Desa
21	Lanjutan Drainase Lali Gg. Ojo	RT 04/ RW 11	170 M	108.273.170,00	Dana Desa
22	Rehab TPQ/TKQ Nurul Ilmi	RW 01	1 Unit	54.000.000,00	Pajak
23	Pembangunan gedung MDTA Muhibbatul Khiriyah	RW 03	1 Unit	100.000.000,00	Pajak
24	Pembangunan Pagar Desa PAUD	RW 08	100 M	100.000.000,00	Dana Desa
25	Rehab Pendopo Kuburan	RW 02	1 Unit	17.600.00,00	Retribusi
26	Lanjutan Pembangunan Gedung BPD	RT 01/RW 02	1 Unit	180.000.000,00	Pajak

Sumber: Musrembangdes Desa Wonosari, 2020

Musrembangdes adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder) yang ada di Desa. Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan musyawarah desa yang ideal. Namun dalam pelaksanaan musrembangdes di hampir semua desa masih sebatas kegiatan rutinitas dan ruang pertemuan. Musrembangdes itu sebagai media pertemuan bagi pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk merembugkan dan memikirkan persoalan-persoalan terkait pembangunan desa sebelum diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama di desa.

Salah satu pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan adalah pembangunan Gang Muslimin di RT 01/04 Desa Wonosari sebagaimana terlampir. Pembangunan jalan tidak berjalan dengan baik karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana di awal. Jalan gang selebar 3 Meter dan panjang hampir 800 Meter pada tahun 2020 sudah di base sepanjang 192 Meter. Namun, base jalan tersebut bergelombang bahkan gioteknya tidak tertutup base, karena basenya diduga tidak sesuai bestek. Dari pengamatan tersebut terlihat ketidak seriusan pemerintah desa Wonosari atas pembangunan infrastruktur di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.

Salah satu poin penting dalam sebuah pembangunan adalah adanya transparansi program sehingga masyarakat dapat mengetahui pembangunan yang ada di daerah mereka. Dalam rangka memberikan transparansi kegiatan pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis menggelar menggelar Musyawarah Desa Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran setiap tahunnya. Namun berdasarkan pengamatan

peneliti diketahui bahwa musyawarah tersebut hanya di hadiri oleh Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua LKMD, Pendamping Desa Pembangunan, Kepala Kewilayahan, dan Ketua RT/RW se-Desa Wonosari. Musyarawah tersebut hanya di hadiri beberapa petinggi desa tanpa melibatkan masyarakat dan kecendrungannya adalah pihak desa telah merumuskan perencanaan pembangunan sehingga saat musyawarah berlangsung hanya sekedar melegalkan dan mensahkan perencana tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan sebagaimana uraian berikut:

1. Kurang maksimalnya pembangunan infrastruktur di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
2. Ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan dengan hasil yang direncanakan.
3. Kurang transparansinya dana pembangunan desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
4. Kurangnya sosialisai dari pihak Desa terhadap masyarakat sehingga masih ada yang tidak berpartisipasi dalam peningkatan infrastruktur

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**

B. Perumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan wawasan berpikir dan menerapkan teori yang telah didapatkan diperkuliahan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dan sebagai bahan masukan dalam pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Nawawi (2013: 17) secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintahan diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Inilah salah satu cirri sebuah organisasi pemerintahan modern yang membedakan dengan sebuah organisasi pemerintahan tradisional yang acuannya bukan *rule of law* tetapi sebuah kekuasaan atau kekuatan.

Menurut Rasyid (2000: 13), lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat,

sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Sarundajang (2002:5), kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. Disisi lain Munaf (2016: 47) menyatakan bahwa proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada negara tersebut.

2. Konsep Manajemen

Menurut Siswanto (2009:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Stoner, et. Al. (dalam Zulkifli 2014:17) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Manulang (1999:4) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. G.R Terry dalam (Marnis. 2011;3) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sementara itu Handoko (1997;6) menjelaskan ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu:

- a. Untuk mencapai tujuan
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012;47), fungsi-fungsi manajemen meliputi:

- a. Perencanaan (*planning*),
- b. Pengorganisasian (*organizing*)

- c. Pengarahan (*commanding*),
- d. Pengkoordinasian (*coordinating*),
- e. Pengendalian (*controlling*).

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI, 2002: 534). Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan (Rohani, 2010: 2). Sedangkan menurut Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan (Siswanto, 2005: 21). Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya (Munir, 2006: 9). Mardiasmo (1999: 11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sehingga terlihat bahwa sumber keuangan daerah salah satunya adalah pajak sehingga perlu dilakukan pengelolaan dalam perpajakan. pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 2009 : 1-2).

Hartati Sukirman mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan senantiasa bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan dasar peserta didik, siapapun yang menjadi peserta didik dimaksud, apakah anak-anak ataukah orang dewasa. Dengan demikian, segala sesuatu yang diatur, ditata, dikelola, senantiasa ditunjukkan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Secara jelasnya, administrasi pendidikan bertujuan menata, mengatur, mengelola segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan kegiatan pendidikan agar mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan secara normative, efektif, dan efisien. Secara normative, seperti telah disinggung dalam pembicaraan mengenai pendidikan, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah falsafah pendidikan, norma-norma etika, dan kaidah-kaidah keilmuan (Sukirman, 2007 : 11).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Terry (2006: 342) dalam pengelolaan terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu: (1) *Planning* (perencanaan) (2) *Organizing* (mengorganisasikan) (3) *Motivating*

(memotivasi) (4) *Controlling* (mengendalikan) (5) *Evaluating* (mengevaluasi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu didalam proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan terorganisir” (Sudjana, 1992 : 41). Perencanaan berarti penentuan program personalia, diantaranya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang akan membantu terciptanya sasaran yang telah disusun oleh perusahaan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Terry, 2006: 342). Lebih jelas Umberto Sihombing mengatakan bahwa “perencanaan pada pendidikan luar sekolah berarti menentukan tujuan yang harus dicapai, menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tujuan, menentukan tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh penyelenggara pendidikan tersebut” (Sihombing,2000:58).

b. *Organizing* (mengorganisasikan)

Pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,

delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik, akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif (Terry, 2006: 342). Pengorganisasian sebagai aktifitas menetapkan hubungan antara manusia dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengertian ini menjelaskan bahwa kegiatan pengorganisasian berkaitan dengan upaya melibatkan orang-orang kedalam kelompok, dan upaya melakukan pembagian kerja diantara anggota kelompok untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan didalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sudjana, 1992 : 77).

c. *Motivating* (memotivasi)

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan (Terry, 2006: 342).

d. *Controlling* (mengendalikan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah di gariskan semula (Terry, 2006: 342). Sahertian (1994 : 353) mengatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan

suatu pekerjaan sudah terlaksana atau belum terlaksana. Hal ini berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan program yang direncanakan. Pengawasan dalam artian ini bersifat dua, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan pekerjaan sudah terwujud dan proses kegiatan dapat terlaksana.

e. *Evaluating* (mengevaluasi)

Evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengevaluasi.

4. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Inu Kencana Syafi'i (2011;97) adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk diderah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah desa menurut Widjaja (2003;3) merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangun pemerintah.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pemerintahan desa. Menurut Saparin (2009;19) menyatakan bahwa pemerintahan desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perakat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakatnya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggraann urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usal dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Konsep Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya.

Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan/irigasi dan bandar udara yang bertujuan untuk pengorganisasian

sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa (Susantono, 2012:194). Fungsi dari pembangunan infrastruktur adalah untuk kelancaran arus barang dan jasa, infrastruktur transportasi akan memberikan dampak yang besar untuk biaya pokok produksi. Infrastruktur merupakan peningkatan aksesibilitas yang mampu untuk memfasilitasi mobilitas barang dan jasa yang lebih efisien.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005, jenis Infrastruktur mencakup :

- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

6. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Hamim (2013: 1) dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik dan material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya dan ketahanan masyarakat.

Pembangunan desa dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (Ginandjar, 1996: 392). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi,

akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten (Wahjudin, dalam Nurman (2015: 266). Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Menurut Raharjo (2013: 17) pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Rahardjo (2006: 3) dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Ayu Suwana (2020)	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan drainase di Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2018	Sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur	1. Lokasi penelitian
2	Maya Rosalina (2013)	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau	Sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur	1. Lokasi penelitian
3	Cici Asmawatiy (2018)	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru Dan Desa Pasar Baru Pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)	Sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah	1. Lokasi penelitian 2. Objek penelitian pembangunan desa sedangkan peneliti pada pembangunan infrastruktur
4	Budi Setiawati (2019)	Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur	Sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur	1. Lokasi penelitian

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir diperlukan untuk mengetahui alur pikiran dari penelitian, sehingga diketahui dasar pikiran hingga landasan pikirnya. Kerangka pikir

mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Berpikir Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan

2. Pemerintah Desa

Kepala desa Wonosari yang dibantu oleh perangkat desa lainnya.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur adalah pembangunan fisik yang ada di desa Wonosari.

4. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

5. Organizing (Mengorganisasikan)

Pengorganisasian sebagai aktifitas menetapkan hubungan antara manusia dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

6. Motivating (Memotivasi)

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan

7. Controlling (mengendalikan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah di gariskan semula

8. Evaluating (Mengevaluasi)

Evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

E. Operasional Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik dan material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat (Hamim,2013:1)	Pengelolaan pembangunan	a. Planning (Perencanaan)	a. Rencana yang dilakukan b. Relaisasi dari perencanaan yang telah dibuat c. Hambatan yang terjadi pada realisasi dari perencana yang telah dibuat
		b. Organizing (Mengorganisasikan)	a. Proses pengelolaan b. Hal yang menjadi faktor mempengaruhi pengelolaan
		c. Motivating (Memotivasi)	a. Pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaannya b. Pemberian motivasi kepada wajib pajak tentang pengelolaan pembangunan infrastruktur
		d. Controlling (mengendalikan)	a. Bentuk pengawasan yang dilakukan b. Tindakan dari hasil pengawasan
		e. Evaluating	a. evaluasi dalam

		(Mengevaluasi)	<p>pengelolaan pembangunan infrastruktur</p> <p>b. proses evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur</p>
--	--	----------------	--

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2022



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Moleong, 2016: 15).

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan seperti Kurang maksimalnya pembangunan infrastruktur di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan dengan hasil yang direncanakan. Kurang transparansinya dana

pembangunan desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Kurangnya kurangnya sosialisai dari pihak Desa terhadap masyarakat sehingga masih ada yang tidak berpartisipasi dalam peningkatan infrastruktur

C. Informan dan Key Informan

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Moh. Nazir, 2005: 55). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud Informan penelitian utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Moh. Nazir, 2005: 77).

Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dan key informan yakni:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa Wonosari	1	Key Informan
2	Sekretaris Desa Wonosari	1	Informan
3	Kaur Perencanaan	1	Informan
4	Ketua BPD	1	Informan
5	Sekretaris BPD	1	Informan
6	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1	Informan
7	Masyarakat Desa Wonosari	2	Informan
Jumlah		8	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2022

D. Teknik Penarikan Informan

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Nazir, 2005: 55). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud Informan penelitian utama (Key Informan) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sampling purposif. Menurut Krisyanto (2007 : 154) sampling purposif yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Persoalan utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya teknik purposif dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data, daripada untuk tujuan representatif yang dapat digeneralisasikan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang di peroleh langsung dari hasil angket dan wawancara tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen, monografi, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 317). Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan

ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang (Sugiyono, 2013: 240). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

3. Observasi

Observasi, yakni penulis melakukan pengamatan langsung terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Observasi untuk tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-macam. Observasi juga memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi, berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi, seperti seorang

laboran menjelaskan prosedur kerja atom hidrogen, atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi. Mengisi data, memiliki maksud bahwa observasi yang dilakukan berfungsi melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian pada penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 43 Jadwal Kegiatan Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kegiatan	2021															
		Bulan dan Minggu Ke-															
		Mar-Juni				Jul-Okt				Nov-Des				Jan-Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuissioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensip Skripsi																
11	Revisi skripsi																
12	Penggandaan skripsi																

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian Raja Kecil sang pendiri Kerajaan Siak menghilir Sungai Jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka setelah sempat bermukim sementara dalam perlindungan Kerajaan Pagaruyung untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singah sementara (transit) kapal-kapal pedagang yang mengarungi Selat Malaka dari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Joh Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minang Kabau yang mengambil kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utamamasyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalanannya.

Kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis. Pada masa persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis

yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana yang pada versi lain berasal dari asal kata “mengkalis” yang merupakan wujud kesabaran terdalam sang raja setelah tersingkir dari Malaka.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Siak bergabung menjadi salah satu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pernyataan penggabungan oleh Sultan Syarif Kasim II kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1946, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian berdasarkan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tertanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditetapkanlah 11 (sebelas) kabupaten yang salah satunya Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis yang meliputi Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak dan Pelalawan (kecuali Langgam). Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

2. Letak Kabupaten Bengkalis

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan termasuk kawasan perairan di sekitarnya adalah 7.773,93 Km² atau setara dengan 777.393 Ha atau sekitar 9,46 % dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km² atau setara dengan 10.793.271 Ha.

Batas-batas Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan pantai bagian barat Negara Malaysia.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

3. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2017 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sehingga jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi sebanyak 11 kecamatan. Sebelumnya Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 102 desa/kelurahan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah aktif 52 desa baru hasil pemekaran sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 154 desa/kelurahan, sementara pada tahun 2015 menjadi 155 desa/kelurahan.

Tabel 5 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa
1	2	3	4
1	Mandau	Air Jamban	11
2	Pinggir	Pinggir	10
3	Bathin Solapan	Sebangar	13
4	Talang Mandau	Beringin	9
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	10
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	17
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	7
8	Rupat	Batu Panjang	16
9	Rupat Utama	Tanjung Medang	8
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	31
11	Bantan	Selat Baru	23
Kabupaten Bengkalis			155

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak terdapat pada desa Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis Kota yang memiliki 31 Desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah kecamatan Bandar Laksamana yang memiliki 7 desa. Secara keseluruhan

pada Kabupaten Bengkalis memiliki 155 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

4. Kependudukan Kabupaten Bengkalis

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 573.504 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 565.569, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,88 persen.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan
1	2	3	4	5
1	Mandau	Air Jamban	153.251	0.87
2	Pinggir	Pinggir	62.659	1.21
3	Bathin Solapan	Sebangar	93.542	2.86
4	Talang Mandau	Beringin	24.353	1.97
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	22.203	2.65
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	24.831	3.57
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	16.286	3.75
8	Rupat	Batu Panjang	35.203	1.86
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	14.249	1.25
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	84.342	2.02
11	Bantan	Selat Baru	42.585	2.16
Kabupaten Bengkalis			573.504	1.88

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis diketahui sebanyak 573.504 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.88 pada tahun 2021. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Mandau dengan ibukotanya Air Jamban dengan jumlah penduduk sebanyak 153.251 sedangkan kecamatan dengan

jumlah penduduk paling sedikit pada kecamatan Rupert Utara dengan ibukotanya Tanjung Medang dengan jumlah penduduk sebanyak 14.249 jiwa.

B. Kecamatan Bengkalis

1. Letak Geografis Kecamatan Bengkalis

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis dengan letak wilayahnya $1^{\circ}15'$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}36'6''$ Lintang Utara, $102^{\circ}00'$ Bujur Timur s/d $102^{\circ}3'29''$ Bujur Timur.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bengkalis, luas wilayah kecamatan Bengkalis adalah 514 km^2 , dengan desa terluas adalah desa Kelemantan dengan luas 61 m^2 atau sebesar 11,70% dari luas kecamatan Bengkalis seluruhnya. Dan yang terkecil adalah kelurahan Bengkalis Kota dengan luas 2 km^2 atau sebesar 0,38 % dari luas keseluruhan. Desa/kelurahan dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bengkalis adalah desa Sekodi dengan jarak lurus 60 km, kemudian desa Kelemantan dengan jarak lurus 48 km.

2. Kepemerintahan Kecamatan Bengkalis

Kecamatan Bengkalis terdiri dari 31 desa/ Kelurahan yang sudah berstatus definitif. Dari jumlah tersebut terdapat 28 desa yaitu desa Sekodi, Palkun, Kelemantan, Kelemantan Barat, Sungai Batang, Ketam

Putih, Pematang Duku Timur, Pematang Duku, Penebal, Temeran, Damai, kelebuk, Penampi, Kuala Alam, Sungai Alam, Air Putih, Senggoro, Wonosari, KelapaPati, Pedekik, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat, Sebauk, Senderak, Teluk Latak, Meskom, Simpang Ayam, Prapat Tunggal dan 3 kelurahan yaitu kelurahan Rimba Sekampung, Bengkalis Kota dan Damon.

Tabel 7 Jumlah Penduduk dan Presentase Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	
		RW	RT
1	2	3	4
1	Sekodi	6	13
2	Kelemantan	2	7
3	Ketam Putih	3	9
4	Pematang Duku	5	17
5	Penebal	4	16
6	Temeran	4	12
7	Penampi	4	9
8	Sungai Alam	4	9
9	Air Putih	4	10
10	Senggoro	6	17
11	Rimba Sekampung	4	20
12	Bengkalis Kota	3	15
13	Wonosari	5	21
14	Damon	6	20
15	Kelapa Pati	7	24
16	Pedekik	8	16
17	angkalan Batang	3	15
18	Sebauk	4	8
19	Teluk Latak	5	14
20	Meskom	4	10
21	Palkun	4	8
22	Kelemantan Barat	3	8
23	Sungai Batang	3	8
24	Pematang Duku Timur	6	13
25	Damai	3	9
26	Kelebuk	2	7

1	2	3	4
27	Kuala Alam	6	12
28	Pangkalan Batang Barat	3	13
29	Senderak	4	8
30	Prapat Tunggal	6	12
31	Simpang Ayam	6	12
Kecamatan Bengkalis		137	392

Sumber: BPS Kecamatan Bengkalis Dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Bengkalis terdiri dari 31 Desa yang terdiri dari 137 RW dan 392 RT. Desa yang memiliki RW terbanyak adalah Desa Pedekik yang terdiri dari 8 RW dengan 16 dusun. Sedangkan desa yang memiliki RW paling sedikit adalah Desa Kelebeh yang hanya memiliki 2 RW dan 7 Dusun.

3. Kependudukan Kecamatan Bengkalis

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup padat di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel kependudukan berikut:

Tabel 8 Jumlah Penduduk dan Presentase Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengkalis Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Sekodi	1.717	2.07
2	Kelemantan	986	1.13
3	Ketam Putih	1.760	2.1
4	Pematang Duku	2.195	2.58
5	Penebal	1.949	2.22
6	Temeran	1.605	1.91
7	Penampi	1.567	1.79
8	Sungai Alam	2.717	3.08
9	Air Putih	3.643	4.15
10	Senggoro	8.061	9.37
11	Rimba Sekampung	5.337	6.36

1	2	3	4
12	Bengkalis Kota	5.763	6.79
13	Wonosari	8.830	9.34
14	Damon	5.557	6.43
15	Kelapa Pati	8.078	9.45
16	Pedekik	2.839	3.46
17	angkalan Batang	2.607	3.06
18	Sebauk	1.294	1.53
19	Teluk Latak	2.467	2.87
20	Meskom	1.864	2.19
21	Palkun	953	1.1
22	Kelemantan Barat	1.005	1.18
23	Sungai Batang	1.508	1.8
24	Pematang Duku Timur	1.396	1.65
25	Damai	1.563	1.8
26	Kelebuk	944	1.1
27	Kuala Alam	2.218	2.56
28	Pangkalan Batang Barat	1.816	2.44
29	Senderak	1.503	1.73
30	Prapat Tunggal	1.209	1.42
31	Simpang Ayam	1.163	1.36
	Kecamatan Bengkalis	86.114	100.00

Sumber: BPS Kecamatan Bengkalis Dalam Angka, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Bengkalis memiliki jumlah penduduk sebanyak 86.114 jiwa dengan Desa dengan penduduk terbanyak pada desa Wonosari dengan jumlah penduduk sebanyak 8.830 jiwa dengan desa dengan penduduk paling sedikit adalah pada desa Kelebuk sebanyak 944 jiwa.

C. Desa Wonosari

1. Profil Desa Wonosari

Desa Wonosari berasal dari dua kata yaitu wono yang berarti hutan dan sari yang berarti pusat atau inti. Jadi Wonosari dahulunya adalah pusat atau inti hutan yang berada di Kecamatan Bengkalis. Maka sekitar

tahun 1920 dibukalah hutan ini oleh pendatang yang berasal dari daerah Jawa, diantaranya Masroes, Tono Rejo, H. Saleh, Ustadz Sukir, Atmo Saputro, Kiyai Minhad, Sariman, Manan, Tarmizi, Mubin, Salamun, dan lain-lain yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama Masroes. Kemudian sekitar tahun 1946, Kampung Wonosari diubah menjadi Desa Wonosari.

2. Letak Geografis Desa Wonosari

Desa Wonosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang terletak disebelah selatan Kota Bengkalis, berbatasan langsung dengan ibukota Bengkalis, dengan luas wilayah sekitar 1.633 ha. Desa Wonosari berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Jangkang.
- b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bengkalis Kota, Kelurahan Damon, dan Kelurahan Rimba Sekampung
- c. Sebelah Barat dengan Desa Pedekik
- d. Sebelah Timur dengan Desa Senggoro

3. Kependudukan Desa Wonosari

Penduduk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Jawa sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan local yang lain sudah dilakukan oleh

masyarakat sejak adanya Desa Wonosori dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Wonosori mempunyai jumlah penduduk 7.266 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.678 jiwa, perempuan 3.588 jiwa dan 2.004 kk, yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 Penduduk Desa Wonosori

No	Dusun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1	Dusun Timur Sari	1.107	896
2	Dusun Tanjung Sari	525	540
3	Dusun Mekar Sari	754	735
4	Dusun Mukti Sari	761	831
5	Dusun Antar Sari	531	586

4. Sarana dan Prasarana

Desa Wonosori dilengkapi oleh beberapa sarana dan prasarana pendukung dari pemerintahan di Desa Wonosori sebagaimana tabel sarana dan prasarana berikut:

Tabel 10 Sarana dan Prasarana Desa Wonosori

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Gedung Pertemuan	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit
4	Masjid	5 Unit
5	Mushola	7 Unit
6	TK UMUM/TK AGAMA	3 Unit
7	SD Negeri	2 Unit
8	SMP Negeri/MTS Negeri	2 Unit
9	MDA	4 Unit
10	Air Bersih	1 Unit

1	2	3
11	MCK	-
12	Jalan Lingkungan	98, 30 Ha
13	Lapangan Bola Kaki	1 Ha
14	Lapangan Bola Volly	1 Unit
15	Poskesdes/Posyandu	5 Unit
16	KUD (Unit)	1 Unit
17	Gedung PKK	1 Unit
18	BUM Desa	1 Unit
19	Balai Desa	1 Unit
20	Jembatan Penghubung Jalan	-
21	Kantikmas	-
22	Listrik Kampung	1 Unit
23	Gorong-gorong	-
24	Polindes	1 Unit
25	Gereja	-
26	Pustaka	-
27	Gedung Karang Taruna	-
28	Gedung Serba Guna	1 Unit

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonosari

Struktur Organisasi Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Sumber: Kantor Desa Wonosari, 2022

Gambar 2
Struktur Organisasi Desa Wonosari

Visi

Visi desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa dalam jangka waktu tertentu. Penentuan visi Desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa, seperti Pemerintahan Desa, badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Desa Wonosari adalah :

“MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA“

Misi

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar tercapai Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasikan atau dilaksanakan. Sebagai penyusunan visi, misipun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dari dari kebutuhan Desa.

Sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Wonosari adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna.
2. Membangun sarana dan prasarana penunjang transportasi, perekonomian, pendidikan, keagamaan, serta keamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Menjaga dan mengembangkan budaya adat dan istiadat sebagai identitas masyarakat Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Key Informan dan Informan

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada dilokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Informan pada penelitian ini (Bagong, 2005: 172).

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari Informan kunci (key informan) yaitu Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022. Selanjutnya melakukan wawancara dengan infirman yaitu Sekretaris Desa Wonosari Bapak M.Zulkarnain S.Tr.T, tanggal 10 Maret 2022. Serta peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.Ip, tanggal 10 Maret 2022.

B. Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan berarti penentuan program personalia, diantaranya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang akan membantu terciptanya sasaran yang telah disusun oleh perusahaan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

“Rencana yang dilakukan desa adalah melakukan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau RPJMD” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa perencanaan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis diketahui tentang arah kebijakan pembangunan yaitu Tema pembangunan “Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; pemantapan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan; dan penyiapan pemilihan daerah yang aman, tertib dan rendah konflik.

Selain adanya penyelarasan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis, Perencanaan juga melibatkan unsur masyarakat lainnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa juga melibatkan semua unsur masyarakat misalnya, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Wonosari Bapak M.Zulkarnain S.Tr.T, tanggal 10 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwasannya pemerintah desa dalam melakukan rencana penyusunan pembangunan jangka menengah selalu melibatkan masyarakat kemudian hampir senada dengan yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Wonosari berikut:

“Unsur masyarakat dimaksudnya itu melibatkan masyarakat, bermusyawarah, tokoh adat, tokoh agama, kantibnas, babinsa kita undang, dan kepala dusun dan warganya untuk mewakili keseluruhan masyarakat” (Wawancara dengan ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.Ip, tanggal 10 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

Diketahui bahwa adanya keikutsertaan Babinsa Koramil 01/Bengkalis, beserta 1 anggota Koramil 01 membantu masyarakat serta

pemuda Desa Wonosari khususnya Dusun 01 Rw 05, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bantuan melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) berupa kegiatan gotong royong perbaikan semenisasi parit kanan kiri jalan dan membersihkan selokan di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan hal diatas Kepala Desa Wonosari menambahkan bahwa adanya unsur penganggaran dalam perencanaan pembangunan di desa Senggoro sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Bentuk realisasi dari perencanaan pembangunan desa Wonosari tentunya dengan penganggaran pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa anggaran merupakan salah satu unsur yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan di desa Wonosari. Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis 2020 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun Anggaran 2021 dan usulan pembangunan ke kabupaten untuk tahun anggaran 2022 diketahui beberapa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur sebagaimana data pada tabel berikut:

Tabel 11 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Tahun 2020

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Ket
1	2	5	6
1	Semenisasi Gg. Hidayat	85.989.399,66	Dana Desa
2	peningkatan Gg. Akasia	91.024.700,40	Dana Desa
3	Semenisasi Gg. Abdul Samad	124.670.601,00	ADD
4	Semenisasi Gg. Pinang	101.079.450,00	ADD

1	2	5	6
5	Semenisasi Gg. Muslimin	176.925.950,25	ADD
6	Semenisasi Gg. Halimah	62.742.349,56	ADD
7	Lanjutan Semenisasi Gg. Merdeka	65.684.515,00	Dana Desa
8	Peningkatan Gg. Habibi	146.450.550,00	Dana Desa
9	Pembangunan Parit Lingkungan	95.704.350,00	Dana Desa
10	Pembangunan Parit Beton Gg. Yakin	127.620.625,50	Dana Desa
11	Lanjutan Drainase Gg. Makmur	94.227.249,85	P3ID
12	Lanjutan Drainase Gg. Rozali	58.430.000,000	P3ID
13	Pembangunan Parit Beton Lingkungan	60.953.599,70	ADD
14	Lanjutan Drainase Lingkungan Gg. Durian	48.872.850,00	P3ID
15	Pembangunan Drainase Gg. Halim I	49.307.850,00	Dana Desa
16	Pembangunan Duiker Jl. Antarsari II	30.481.400,00	Dana Desa
17	Pembangunan Duiker Gg. Karet 4	35.078.450,00	Dana Desa
18	Pembangunan Duiker Gg. Sekapur Sirih	35.078.450,00	Dana Desa
19	Pembangunan Duiker Gg. H. Solihin	35.078.450,00	Dana Desa
20	Pembangunan Gorong-Gorong Gg. Amal	13.000.000,00	Dana Desa
21	Lanjutan Drainase Gg. Ojo Lali	108.273.170,00	Dana Desa
22	Rehab TPQ/TKQ Nurul Ilmi	54.000.000,00	Pajak
23	Pembangunan gedung MDTA Muhibbatul Khiriyah	100.000.000,00	Pajak
24	Pembangunan Pagar PAUD Desa	100.000.000,00	Dana Desa
25	Rehab Pendopo Kuburan	17.600.00,00	Retribusi
26	Lanjutan Pembangunan Gedung BPD	180.000.000,00	Pajak

Sumber: Musrembangdes Desa Wonosari, 2020

Banyaknya unsur yang menjadi pertimbangan dari perencanaan pembangunan di Desa Wonosari, juga tidak ditemukan hambatan-hambatan sebagaimana di ungkap oleh Kepala Desa Wonosari berikut ini:

“tidak ada karena selama ini pembangunan infrastruktur di Desa berjalan dan terlaksana dengan baik” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak ada hambatan terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari. Namun dari hasil pengamatan di ketahui bahwa dari banyaknya

pembangunan di Desa Wonosari masih terdapat pembangunan yang tidak selesai tepat waktu dan terkesan terbengkalai. Salah satu pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan adalah pembangunan Gang Muslimin di RT 01/04 Desa Wonosari sebagaimana gambar terlampir.

Pembangunan jalan tidak berjalan dengan baik karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana di awal. Jalan gang selebar 3 Meter dan panjang hampir 800 Meter pada tahun 2020 sudah di base sepanjang 192 Meter. Namun, base jalan tersebut bergelombang bahkan gioteknya tidak tertutup base, karena basenya diduga tidak sesuai bestek. Dari pengamatan tersebut terlihat ketidak seriusan pemerintah desa Wonosari atas pembangunan infrastruktur di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.

Selain pembangunan diatas terdapat pula proyeknya terbengkalai pada Jalan Wonosari Tengah Ujung, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis sebagaimana gambar terlampir. Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa masyarakat yang bermukim di Jalan Wonosari Tengah Ujung, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis mengeluhkan jalan desa mereka rusak diduga akibat keluar masuk mobil proyek pembangunan waduk PDAM dan gedung Sekolah SMA Plus. Proyek pembangunan SMU Plus dikerjakan PT Penampi Windu Sentosa , sedangkan proyek pembuatan bendungan PDAM dilaksanakan PT Dian Karisma Kencana. Diduga penyebab jalan tersebut hancur karena kendaraan proyek melebihi tonase kekuatan jalan. Akibatnya jalan desa

sepanjang 1 kilometer itu sulit dilewati. Jalur jalan pemukiman selebar 1,5 meter dengan ketebalan semen sekitar 15 cm saat ini kondisinya rusak berat.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan terkait Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Planning (Perencanaan) yaitu dari segi perencanaan sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tabel observasi berikut:

Tabel 12 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Planning (Perencanaan)

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5	Hasil observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari dengan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2. dalam proses penyusunan hanya di hadiri oleh beberapa petinggi desa tanpa melibatkan masyarakat

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Dari tabel observasi diatas diketahui bahwa dengan adanya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari dengan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis. Namun disisilain diketahui bahwa dalam proses penyusunan hanya di hadiri oleh beberapa petinggi desa tanpa melibatkan masyarakat.

2. Organizing (Mengorganisasikan)

Pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik, akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

“proses yang pertama yaitu penyusunan RPJMD desa yang kedua adalah penyusunan RKP Desa selanjutnya penyusunan anggaran pendapat belanja desa” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa proses pengorganisasian pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis diawali dengan penyusunan anggaran pendapat belanja desa yang juga tertuang anggaran dari Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

“Anggaran sebenarnya sudah ada tapi memang belum bisa merangkul semua pembangunan jadi harus ada pembagian mana yang prioritas mana yang belum dan akan di masukkan ke anggaran tahun depan” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Wonosari Bapak M.Zulkarnain S.Tr.T, tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang ada belum dapat merangkul semua pembangunan di desa Wonosari sehingga dilakukan pembangian pembangunan menjadi prioritas maupun belum sehingga pembangunan yang belum masuk prioritas maka akan di selesaikan pada anggaran tahun berikutnya.

Selain pada anggaran, yang menjadi faktor mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari yaitu sumber daya manusia sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Menurut saya adalah sumber daya manusia. Sumber daya alam dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dipengaruhi oleh sumberdaya manusia sebagai penggerak dan melakukan pembangunan dari pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari. Unsur lainnya yaitu sumber daya alam sebagai tempat maupun lokasi dari pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari seperti lahan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan terkait Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Organizing (Mengorganisasikan) belum berjalan baik. Hal ini dapat terlihat dari tabel observasi berikut:

Tabel 13 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Organizing (Mengorganisasikan)

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5	Hasil observasi	1. Segi pengorganisasian belum berjalan dengan baik terlihat dari belum tercukupinya dana

1	2	3
		anggarannya yang ada

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Dari tabel observasi diatas diketahui bahwa segi pengorganisasian belum berjalan dengan baik terlihat dari belum tercukupinya dana anggarannya yang ada. Hal ini mengakibatkan anggaran yang ada belum dapat merangkul semua pembangunan di desa Wonosari.

3. Motivating (Memotivasi)

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

“Menurut saya, bentuk motivasi yang dapat kami berikan hanya pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaannya” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaanya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dalam bentuk pemberian pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini Motivasi menekankan pada caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.

“motivasi sangat penting karena kalau anggota kita tidak beri motivasi bisa jadi tidak semangat dan kinerja menurun karena tidak ada semanga di diri mereka” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Wonosari Bapak M.Zulkarnain S.Tr.T, tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa motivasi sangat penting artinya bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena motivasi merupakan bagian dari kegiatan perusahaan dalam proses pembinaan, pengembangan, pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan seorang pegawai harus memiliki motivasi sehingga dapat memberikan dorongan agar pegawai bekerja dengan giat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan terkait Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Motivating (Memotivasi) dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tabel observasi berikut:

Tabel 14 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Motivating (Memotivasi)

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5	Hasil observasi	1. Pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk pemberian pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaan serta adanya acara makan bersama atas sebuah proyek yang telah selesai dilakukan

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Dari tabel observasi diatas diketahui bahwa pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk pemberian pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaan serta adanya acara makan bersama atas sebuah proyek yang telah selesai dilakukan.

4. **Controlling (mengendalikan)**

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula.

“Bentuk pengawasan yang dilakukan tentunya karena sifatnya fisik dengan cara turun lapangan” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk pengawasan terkait dari pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam bentuk turun kelapangan untuk meninjau sejauhmana pembangunan dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.

Dari gambar terlampir diketahui adanya proses pengawasan dari proyek pembangunan diketahui dalam bentuk peninjauan kelapangan untuk melihat sejauh mana pekerjaan dilakukan dan disesuaikan dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Dalam melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan lainnya seperti melibatkan unsur

masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

“Pemerintah desa terus memantau dan memantau secara langsung pengembangan, di bawah dan kontrol staf berapa persentase penyelesaian” (Wawancara dengan ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.Ip, tanggal 10 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalanan desa, yakni dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung dilapangan bersama pekerja. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wonosari mengenai, keterlibatan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan terkait Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Controlling (mengendalikan) dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik

yaitu dapat dilihat dari sisi melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari tabel observasi berikut:

Tabel 15 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Controlling (mengendalikan)

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5	Hasil observasi	1. Pemerintah Desa Wonosari melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Dari tabel observasi diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa Wonosari melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan seperti melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat.

5. Evaluating (Mengevaluasi)

Evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

“Bentuk evaluasi yang dilakukan dengan cara pada tahap perencanaan tahap pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap

pertanggung jawaban” (Wawancara dengan Kepala Desa Wonosari Bapak Suswanto, Tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban. Tahap pelaksanaan yaitu proses pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah di buat. Tahap pengawasan dilakukan saat proses pembangunan dilakukan maupun setelah proses pembangunan dilakukan kemudian dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah selanjutnya apakah dilakukan perbaikan maupun peningkatan dari proyek pembangunan yang telah dilakukan.

Menurut ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.IP pengawasan dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh masyarakat namun tidak semua masyarakat secara umum mengawasi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Susah karena setiap orang punya tugasnya masing-masing pada siang hari, sehingga mereka kurang memperhatikan” (Wawancara dengan ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.Ip, tanggal 10 Maret 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja

pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. Serta kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban. Dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah selanjutnya apakah dilakukan perbaikan maupun peningkatan dari proyek pembangunan yang telah dilakukan. Namun disisi lain masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat

ditarik kesimpulan terkait Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Evaluating (Mengevaluasi) dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tabel observasi berikut:

Tabel 16 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada indikator Evaluating (Mengevaluasi)

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5	Hasil observasi	1. Evaluasi dilakukan beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Dari tabel observasi diatas diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah Desa Wonosari beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban.

C. Pembahasan

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian

tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006: 3).

Perencanaan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis. Selain itu dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. Anggaran merupakan salah satu unsur yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan di desa Wonosari. Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis 2020 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun Anggaran 2021 dan usulan pembangunan ke kabupaten untuk tahun anggaran 2022 diketahui beberapa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) khususnya dari sisi pembangunan infrastruktur.

Proses pengorganisasian pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis diawali dengan penyusunan anggaran pendapat belanja desa yang juga tertuang anggaran dari Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Selain itu pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dipengaruhi oleh sumberdaya manusia sebagai penggerak dan melakukan pembangunan dari pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari. Unsur lainnya yaitu sumber daya

alam sebagai tempat maupun lokasi dari pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari seperti lahan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Bentuk pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dalam bentuk pemberian pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini Motivasi menekankan pada caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. motivasi sangat penting artinya bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena motivasi merupakan bagian dari kegiatan perusahaan dalam proses pembinaan, pengembangan, pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan seorang pegawai harus memiliki motivasi sehingga dapat memberikan dorongan agar pegawai bekerja dengan giat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Bentuk pengawasan terkait dari pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam bentuk turun kelapangan untuk meninjau sejauhmana pembangunan dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat. adanya proses pengawasan dari proyek pembangunan diketahui dalam bentuk peninjauan kelapangan untuk melihat sejauh mana pekerjaan dilakukan dan disesuaikan dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Dalam melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan lainnya seperti melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua

tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wonosari mengenai, keterlibatan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban. Tahap pelaksanaan yaitu proses pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah di buat. Tahap pengawasan dilakukan saat proses pembangunan dilakukan maupun setelah proses pembangunan dilakukan kemudian dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah selanjutnya apakah dilakukan perbaikan maupun peningkatan dari proyek pembangunan yang telah dilakukan. Menurut ketua BPD Desa Wonosari Bapak H. Delfa Hariyadi, Lc., M.IP pengawasan dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh masyarakat namun tidak semua masyarakat secara umum mengawasi.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih

kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti ditemukan beberapa hasil penelitian berikut:

Tabel 17 Hasil Observasi Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur
2	Tempat observasi	Desa Wonosari
3	Waktu kegiatan	14 Maret 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
4	Aktor yang di observasi	Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari
5		<p>Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Wonosari dengan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2. dalam proses penyusunan hanya di hadir oleh beberapa petinggi desa tanpa melibatkan masyarakat <p>Organizing (Mengorganisasikan)</p> <p>Segi pengorganisasian belum berjalan dengan baik terlihat dari belum tercukupinya dana anggarannya yang ada</p>

1	2	3
		<p>Motivating (Memotivasi) Pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk pemberian pujian dan semangat dalam melakukan pekerjaan serta adanya acara makan bersama atas sebuah proyek yang telah selesai dilakukan</p>
		<p>Controlling (mengendalikan) Pemerintah Desa Wonosari melakukan peninjauan juga melibatkan unsur kemasyarakatan</p>
		<p>Evaluating (Mengevaluasi) Evaluasi dilakukan beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban</p>

Sumber: Olahan Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa peneliti mengobservasi Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur. Lokasi dari observasi yang dilakukan peneliti terletak di Desa Wonosari. Sedangkan aktor atau objek yang di observasi terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Wonosari. Dari hasil observasi diketahui bahwa Pemerintahan Desa Wonosari melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur. Dari pengamatan dan wawancara diketahui bahwa anggaran khusus pengelolaan infrastruktur tidak cukup karena harus berbagi dengan program lainnya. Jumlah perangkat desa yang masih kurang. Dari pengamatan diketahui Kepala Desa suka memuji hasil kerja para perangkat pemerintahan Desa Wonosari. Kepala Desa dan Perangkat pemerintahan Desa sesekali memantau proyek pembangunan dengan turun ke lapangan secara langsung.

BAB VI

PENUTUP

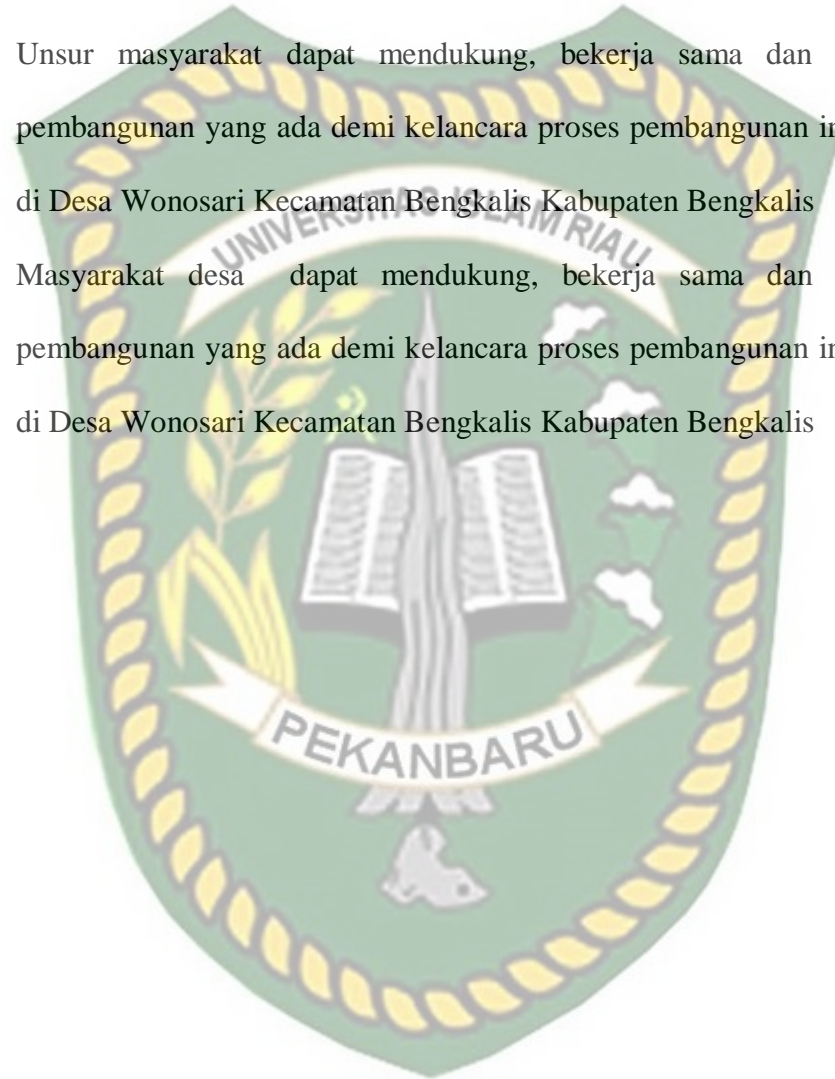
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat ditarik kesimpulan Perencanaan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari di selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis serta dalam penyusunan rencana pembangunan selalu melibatkan unsur masyarakat. Proses pengorganisasian pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari diawali dengan penyusunan anggaran pendapat belanja desa. Bentuk pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dalam bentuk pemberian pujian dan semangat. Bentuk pengawasan terkait dari pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam bentuk turun kelapangan. Bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis agar meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur desa demi kepentingan bersama
2. Unsur masyarakat dapat mendukung, bekerja sama dan mengawasi pembangunan yang ada demi kelancara proses pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
3. Masyarakat desa dapat mendukung, bekerja sama dan mengawasi pembangunan yang ada demi kelancara proses pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha. Ilmu
- Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, Danimplikasinya Di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta
- Arief Budiman. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media
- Ginandjar Kartasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
- Hamim, Sufian. 2013. Manaj Emen Strategis Pembangunan Daerah Dan Pedesaan. Yogyakarta: Trussmedia Grafik
- Handoko. T. Hani. 1997. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Inu Kencana Syafi'i. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Rineka Cipta
- Kessa, Wahyudi. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kemendes
- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Mangkunegara. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Manullang. 1999. Manajemen Personalia. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Marihot, Siahaan. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marnis ,Edy. 2011. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nugram
- Moleong, Lexy, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung
- Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurman. 2015. Pembangunan Pedesaan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Payaman, Simanjuntak. 2005. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raharjo. 2013. Strategi Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rasyid, M. 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Safroni, 2012, Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks. Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi), Yogyakarta: : Aditya Media
- Saparin, 2009. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarundajang, S.H. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sasmita. 2013. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
- Sedarmayanti, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Refika
- Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Susantono, 2012. Manajemen Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.Jakarta: Universitas Indonesia

- Widjaja, Haw. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: Pt Raja. Grafindo Persada.
- Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta: Salemba Teknik

Perundang-Undangan:

- Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 pemerintahan desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Jurnal:

- Ayu Suwana. 2020. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dandrainasedi Desa Parit Kecamatan Karimun Tahun 2018. Jurnal Trias Politika, Vol 4. No.1 April 2020. Universitas Riau Kepulauan
- Budi Setiawati. 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol. 3, No. 2, September 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
- Cici Asmawatiy. 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru Dan Desa Pasar Baru Pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Vol 2 No. 3 –September 2018. Stia Bina Banua Banjarmasin.
- Maya Rosalina. 2013. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau

Barat Kabupaten Malinau. Ejournal Pemerintahan Integrattif, Volume 1, Nomor 1, 2013: 106-120. Universitas Mulawarman

Internet:

<https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>

Wonosari.desa.id



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau